

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi suatu Negara memiliki ikatan pada pembangunan setiap daerahnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dilihat dari struktur ekonomi, perkembangan ekonomi, urbanisasi, angka tabungan dan kualitas hidup serta yang paling utama adalah dilihat dari pembangunan manusianya. Pada dasarnya dikatakan bahwa suatu Negara maju bila Negara tersebut menjadikan tolak ukur pembangunan nasionalnya dengan Indeks Pembangunan Manusia.²

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kali pertama diumumkan oleh UNDP melalui Human Development Report 1996, kemudian dilanjutkan setiap tahun. Dalam hal ini, pembangunan manusia digambarkan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses peningkatan beberapa aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan diamati melalui umur panjang dan sehat, tingkat pendidikan yang memadai dan taraf hidup yang layak. Dalam Pembangunan manusia secara spesifik UNDP menetapkan empat

² Ardiani Maulidia Oktafia. DKK, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 No.1, 2018, hlm. 55.

elemen khusus yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).³

Indeks pembangunan manusia memiliki aspek utama, baik kesehatan, pendidikan yang dicapai dan taraf hidup atau yang disebut ekonomi, ketiga elemen ini penting dalam menentukan kemampuan provinsi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi saling mempengaruhi, tetapi juga banyak faktor lain yang mempengaruhi, antara lain ketersediaan lapangan kerja yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Jika ketiga unsur tersebut perlu ditingkatkan, maka indeks pembangunan manusia dapat lebih meningkat menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah.⁴

Di antara tiga dimensi utama IPM tersebut, terdapat empat indikator yang mempengaruhi IPM, yaitu Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang diharapkan untuk mengukur ukuran pengetahuan dan produk nasional bruto (PNB) per kapita untuk mengukur ukuran standar hidup yang layak. UNDP secara berkala menyempurnakan metodologi, baik dari segi indikator maupun metode perhitungan. Empat indikator di atas telah berubah sejak diperkenalkan. Keempat indikator tersebut awalnya

³ Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim, "Indeks Pembangunan Manusia Indonesia", *Jurnal Ekonomika*, Vol.9 No.1, 2013, hlm.18-19

⁴ Irvana Arofah dan Siti Rohimah, "Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pengeluaran Riil Per Kapita Di Provinsi Nusa Tenggara", *Jurnal SAINTIKA UNPAM*, Vol.2 No.1, 2019, hlm. 77

diperkenalkan termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir, Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipas Kasar (APK) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Selain itu, penghitungan IPM juga mengalami perubahan dari aritmatika menjadi geometrik, nilai IPM berubah dari 0-100. Ketika nilai Indeks Pembangunan Manusia mendekati 100, semakin baik pencapaian pembangunan manusia di daerah tersebut. Perhitungan IPM hanya terdiri dari tiga komponen utama, sehingga kita harus melihat IPM sebagai penyederhanaan dari realitas kompleks dari definisi luas dan dimensi pembangunan manusia.⁵

Dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Diantaranya adanya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi disini merupakan upaya struktural yang bertujuan untuk Produktivitas dan membentuk Kesempatan Kerja yang pada akhirnya akan mempertinggi *income* penduduknya.⁶ Banyak cara untuk mencapai kesejahteraan salah satunya seperti bekerja. Jumlah dan pemerataan pendapatan berhubungan dengan hasil pekerjaannya, usaha dan faktor ekonomi lainnya. Ketika seseorang memiliki pekerjaan, hal tersebut tentu mendapatkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, akan tetapi hal ini harus imbang dengan

⁵ Latif Arafat.DKK, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol.7 No.2,2018, hlm. 143

⁶ Dwi Mahroji, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, 2019. hlm. 52

tersedianya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.⁷

Kualitas pembangunan manusia tidak terlepas juga dari pembangunan Infrastruktur yang ada. Memperbaiki kualitas modal manusia tergantung tersedianya infrastruktur yang menunjang upaya peningkatan kualitas sdm. Adanya disparitas di taraf pendapatan penduduk, keadaan geografi suatu daerah dan kondisi sosial masyarakat yang beragam mengakibatkan suatu taraf pendapatan tidak sebagai tolak ukur utama lagi pada perhitungan pembangunan, tetapi keberhasilan pembangunan manusia tidak bisa lepas dari kinerja pemerintah yang berperan pada membangun regulasi bagi tercapainya keadilan sosial. Pengeluaran pemerintah bisa dipergunakan pula menjadi cerminan dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam satu daerah.⁸

Negara Indonesia, memiliki komitmen dalam pemerintahannya untuk membangun Indeks Pembangunan Manusia yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tentunya menjadi tujuan nasional, sejalan dengan pernyataan UNDP bahwa tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Menurut Ramzi dalam penelitiannya yang berjudul *Investigating the Effect of Public Health Spending on the HDI in Iran*, upaya untuk meningkatkan HDI di Indonesia

⁷ Nabelah Farrasy Jannaty, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banjar", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.1 No.2, 2018, hlm. 231

⁸ Lilis Saryani dan Abdelina, "Analisis Faktor Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padangsidempuan", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8 No.2, 2020, hlm. 508-509

dilakukan melalui perangkat kebijakan fiskal. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran dengan menyediakan barang dan jasa kepada sektor publik yang tidak mampu dijangkau oleh pasar/sektor swasta.⁹

Banyak faktor yang dinilai mempengaruhi penciptaan kesejahteraan manusia, antara lain konsumsi taraf hidup yang layak melalui pengeluaran per kapita. Namun kenyataannya, negara Indonesia yang memiliki jumlah sumber daya manusia yang besar, tercermin dari banyaknya penduduk Indonesia yang menempati urutan ketiga dunia setelah China dan India dengan jumlah penduduk rata-rata usia kerja, tetapi SDM yang dimiliki belum mampu memaksimalkan potensinya, sehingga menyebabkan pengangguran yang cukup tinggi dari tahun ke tahun.¹⁰ Tampaknya hal ini menjadi inti dari pendapatan per kapita yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pengeluaran per kapita akan relatif rendah. Sedangkan konsumsi untuk setiap rumah tangga dan setiap penduduk masih belum tercukupi.

Selain itu pada kenyataannya, pembangunan negara yang komprehensif tidak dapat dicapai dengan pengelolaan pemerintah pusat saja. Pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan sumber permodalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia, tercermin pada komitmen pemerintah yang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

⁹Pieter Noisirifan De Fretes, "Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen", *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, Vol.2 No. 2, 2017, hlm. 1-2

¹⁰Didin S Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Pers, 2014), hlm.102

Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kepastian hukum merupakan titik tolak pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, proses mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dari pertumbuhan PDRB dan APBD.¹¹ Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam hal membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik yaitu pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Untuk membiayai semua itu pemerintah daerah sangat bergantung pada penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Dana lainnya. Pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat dan hal itu akan terjadi jika alokasi dana tepat sasaran yaitu alokasi dana yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.¹²

Kemudian terjadinya ketimpangan Pendapatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, maka adanya undang-undang nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ada sumber lain yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah, yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta pendapatan lainnya yang sah.¹³

¹¹ Hastu Askoro, "Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)", *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.1 No.1, 2018, hlm. 54

¹² Fadli Ali Taslim dan Rheza Pratama, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangani*.Vol.4 No.2, 2021, hlm. 397

¹³*Ibid.*,hlm. 55

Tabel 1.1
Perkembangan IPM Nasional Tahun 2015-2019

PROVINSI	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	78,99	79,6	80,06	80,47	80,76
Jabar	69,5	70,05	70,69	71,30	72,03
Jateng	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73
DIY	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
Jatim	68,95	69,74	70,27	70,77	71,5
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44
Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38
INDONESIA	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

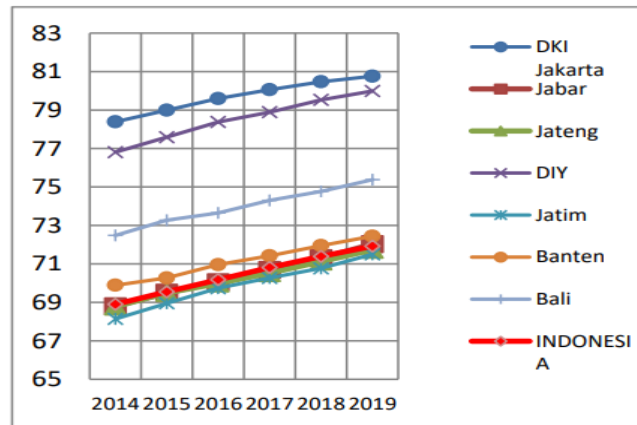
Sumber: Bappenas Jawa-Bali 2020¹⁴

Melalui tabel 1.1, terlihat bahwa selama periode 2015-2019 angka Indeks Pembangunan Manusia Nasional terus meningkat. Adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara nasional tidak terlepas dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia yang ada di setiap Provinsi. Dari data Bappenas Jawa-Bali selama 2015-2019, Provinsi Jakarta mengalami kenaikan yang tertinggi dari 78,99 menjadi 80,76, diikuti dengan Provinsi DI.Yogyakarta yang mengalami kenaikan dari 77,59 menjadi 79,99. Provinsi Bali mengalami kenaikan dari 73,27 menjadi 75,38, dilanjutkan pada Provinsi Banten dengan kenaikan dari 70,27 menjadi 72,44. Kemudian pada Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari 69,5 menjadi 72,03, sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah naik dari 69,49 menjadi 71,73 dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Timur naik dari 68,95 menjadi 71,5.

¹⁴Ika Retna Wulandary, *Pembangunan Daerah Dalam Angka*, (Jakarta:BAPPENAS,2020), hlm. 9.

Gambar Grafik 1.1

Perkembangan IPM Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: Bappenas Jawa-Bali 2020¹⁵

Melalui grafik 1.1, terlihat bahwa indeks IPM antar provinsi di wilayah Jawa-Bali periode 2015 – 2019 mengalami peningkatan. Empat provinsi menduduki tingkat IPM Nasional sebesar 71,92, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 80,76 menduduki ranking pertama ditingkat Nasional, Provinsi DI. Yogyakarta dengan Capaian IPM 79,99 menduduki ranking kedua, dan Provinsi Bali dengan capaian 75,38 menduduki ranking kelima, Provinsi Banten dengan capaian 72,44 menduduki ranking kedelapan, sedangkan Provinsi Jawa Barat dengan capaian 72,03 berada pada ranking kesepuluh. IPM terendah pada Provinsi yang berada Jawa-Bali terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 71,5 yang menduduki ranking kelima belas secara nasional.¹⁶

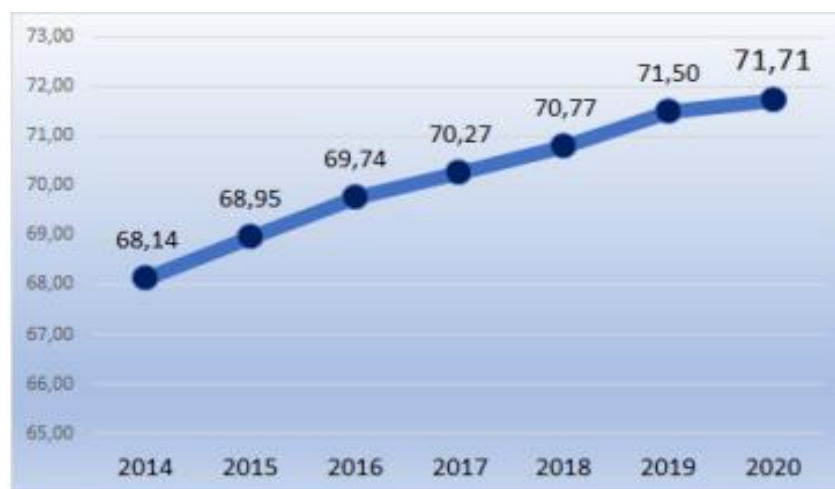
Dari data Nasional Jawa- Bali dapat kita lihat bahwa perkembangan indikator utama wilayah salah satunya mengemukakan Indeks Pembangunan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 9

¹⁶*Ibid.*, hlm. 9

manusianya. Selain itu Kesejahteraan Masyarakat dari suatu daerah merupakan suatu indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Kesejahteraan yang dimaksud tidak lain adalah kondisi masyarakat yang berada pada standar kemakmuran. Kesejahteraan masyarakat ini dapat di refleksikan melalui beberapa indikator salah satunya Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar Grafik 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur
2014-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur¹⁷

Grafik 1.2 menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur mengklaim pembangunan manusianya mengalami kemajuan yang berkelanjutan dari tahun 2014 hingga 2020. Dari 68,14 pada tahun 2014, meningkat menjadi 71,71 pada tahun 2020 atau selama periode ini telah tumbuh sebesar 5,24 %. Rata-rata pertumbuhan IPM periode 2014-2020 adalah 0,86%/tahun.

¹⁷Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2020*, (Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Jawa Timur,2020), hlm. 2

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya meningkatkan efektivitas kerja pembangunan manusia agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur.¹⁸

Grafik 1.1 dan 1.2 menerangkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang Indeks Pembangunan Manusia-nya terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dilihat dari segi grafik dan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur menempati urutan terakhir di antara Provinsi Jawa-Bali. Adanya ketimpangan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus di Provinsi Jawa Timur.

Dalam kemajuan grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. Hal yang mendasari penelitian ini adalah bahwa untuk menghasilkan manusia yang berkualitas tentu terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia. Adanya desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan biaya pembangunan daerahnya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pertanyaan ini mendasari bahwa sumber keuangan pemerintah daerah guna membiayai belanja daerah dalam rangka pembangunan daerahnya tertuang pada Pendapatan Asli Daerah.

Adanya ketimpangan kemampuan daerah satu dengan daerah yang lain, tentu menjadi suatu akibat ketidakmerataan pembangunan daerah. Untuk itu, untuk membantu menghimpun dana di setiap daerah, pemerintah pusat

¹⁸*Ibid.*, hlm.2-3

membentuk dana bantuan yang disebut Dana Perimbangan. Oleh karena itu penulis mengambil variabel X1 berupa pendapatan asli daerah dan X2 berupa dana perimbangan. Kemudian dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan ekonomi merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di suatu negara. Pendapatan yang tinggi cenderung membantu seseorang mengakses kebutuhan yang lebih mendasar. Jadi, ketika tingkat pendapatan naik secara signifikan, secara otomatis meningkatkan total pengeluaran rumah tangga. Di mana ini adalah inti dari satu aspek IPM, yaitu kelangsungan hidup. Oleh karena itu, penulis mengangkat tingkat konsumsi standar hidup layak yang disesuaikan dengan pengeluaran per kapita sebagai variabel X3.

Dalam konteks ini, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, perlu adanya Identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Dari tahun ke tahun Angka Indeks Pembangunan di Indonesia mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tentu juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Akan tetapi saat dibandingkan dengan IPM di 6 Provinsi lain yang berada di pulau Jawa, IPM yang paling rendah rendahnya capaian IPM Jawa Timur.
2. Kurangnya pemaksimalan potensi sumber daya manusia menyebabkan tingkat kelayakan hidup tidak konsisten dimana didalamnya terdapat pengeluaran perkapita yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan manusia.
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka tanggung jawab membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik yaitu pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya tertuang pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
4. Nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita dapat berpengaruh, baik berpengaruh secara positif maupun berpengaruh secara negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang penelitian diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Pengeluaran Perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah terdapat Pengaruh Simultan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur
2. Menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur
3. Menguji pengaruh Pengeluaran Per kapita terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur

4. Menguji pengaruh simultan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan kajian ilmu pengetahuan dan gambaran dalam aspek Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pengeluaran Per-Kapita serta tingkat Indeks Pembangunan Manusia, kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam aspek tersebut.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yang praktis yakni:

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemegang wewenang dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Per-Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga target Pemerintah Daerah dalam mengupayakan Pembangunan

Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Manusia dapat berjalan dengan tepat.

b. Bagi Akademik (FEBI)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan keterkaitan dalam bidang Indeks Pembangunan Manusia di masa mendatang baik untuk peneliti maupun masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan dengan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang akan datang, sehingga bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang Lingkup pada penelitian dan Batasan ini bertujuan untuk menghindari dari pembahasan yang melebar. Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan financial, maka peneliti memberikan batasan, bahwa penelitian berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dimana variabel bebas yang dimaksudkan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita. Sementara itu, variabel terikat

dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2018-2020.

Penulis memberikan ruang lingkup, dimana Pendapatan Asli Daerah yang dimaksudkan adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh masing-masing Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk Dana Perimbangan dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari Dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk Pengeluaran Perkapita sendiri merupakan perolehan Pengeluaran Perkapita yang telah disesuaikan dari masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Dan penulis menggunakan capaian Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sebagai tolak ukurnya.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh melalui salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah.
- b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- c. Pengeluaran Per-Kapita adalah Biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam beberapa periode tertentu.

- d. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu ukuran dari kondisi Sumber Daya Manusia pada suatu negara.

2. Definisi Operasional

a. Pendapatan Asli Daerah

Salah Satu bentuk Desentralisasi di Indonesia adalah adanya sumber keuangan daerah yang tertuang melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD adalah jenis pendapatan yang ada di daerah secara riil. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh secara riil dalam kurun waktu tertentu, pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat yaitu berasal dari pemanfaatan potensi daerah. Data yang diambil terkait Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini merupakan data langsung Pendapatan Asli Daerah Per Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur dalam Kurun waktu 2018-2020 melalui situs Badan Pusat Statistik.

b. Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 mengenai dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di dalam Dana Perimbangan sendiri terdiri atas DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dalam data yang akan diambil dalam penelitian ini akan berfokus pada keseluruhan Dana

Perimbangan dari kurun Waktu 2018-2020 dengan pusat data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

c. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita merupakan perhitungan antara pengeluaran konsumsi semua anggota keluarga selama satu bulan dan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat. Maka dari itu data Penelitian dengan Variabel Pengeluaran Per-Kapita yang telah disesuaikan dan didapatkan melalui situs Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 2018-2020.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu tolak ukur kualitas hidup masyarakat pada sebuah negara adalah tingginya Tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah hasil pengukuran dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dari masyarakat di suatu wilayah. Data Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data langsung yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik Jawa Timur dalam Kurun waktu 2018-2020.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini berisikan mengenai penjelesan tentang isi yang terdapat pada beberapa bab yang ada secara singkat dari skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mempunyai isi berupa latar belakang dari masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memiliki isi mengenai telaah pustaka yang berupa penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori serta konsep yang akan di pergunakan, kerangka dari penelitian dan juga hipotesis yang di teliti.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang memiliki isi tentang jenis dari penelitian, lokasi serta waktu penelitian dilaksanakan, populasi dan sample, teknik yang digunakan pada saat pengumpulan data, skala pengukuran, definisi secara konsep dan operasional, instrumen dari penelitian, pengujian instrumen yang di teliti, serta alat yang digunakan saat melakukan analisis.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, dimana di dalamnya memuat deskripsi data dan juga pengujian terhadap hipotesis.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pembahasan ini terkait dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang dibuktikan dengan pengujian atas hipotesis.

6. BAB VI PENUTUP

Bab VI berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian akhir penulisan skripsi terdapat daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.